https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 1, Februari 2024

E-ISSN: 3046-4560



Urgensi Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Sistem Pencatatan Kelahiran (Literature Riview Bab I Buku Karya: Dr.Haznah Aziz S.H.,M.H)

The Urgency Of Legal Aspects Of Child Protection And
The Birth Registration System
(Literature Review from Book by: Dr. Haznah Aziz S.H., M.H)

Aulya Devi Indang Meuthia

¹ Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, *Email: aulya.dim@gmail.com* *Email Koresponden: *aulya.dim@gmail.com*

Article Info Abstract

Article history:
Received: 13-02-2024
Revised: 15-02-2024
Accepted: 18-02-2024
Published: 20-02-2024

The aim of this research is to examine the book (literature review) Chapter 1 of the book Legal Aspects of Child Protection and Birth Registration Systems written by Dr. Hasnah Aziz, M.Pd, M.H. In this chapter it is explained that the state is obliged to provide protection and recognition for the determination of personal status and legal status for every Population Event and Important Event experienced by Indonesian Residents who are inside and/or outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In addition, it is explained that every resident has the right to population documents resulting from Population Registration and Civil Registration services. This chapter also explains the meaning of a birth certificate, the function of a birth certificate, the power of proof of the certificate, and the importance of a birth certificate for a person's legal protection. This chapter explains that the state is obliged to provide protection and recognition of the existence of every resident by recording important events such as birth as stated in a birth certificate.

Keywords: Definition of children, children's rights, children's position

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji buku (literatur review) Bab 1 buku Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran karangan Dr. Hasnah Aziz, M.Pd, M.H. Pada bab ini dijelaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dijelaskan bahwa setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pada bab ini juga dijelaskan tentang pengertian akta kelahiran, fungsi akta kelahiran, kekuatan pembuktian akta, serta pentingnya akta kelahiran bagi perlindungan hukum seseorang. Bab ini menjelaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan setiap penduduknya melalui pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran yang dituangkan dalam akta kelahiran.

Kata Kunci: Pengertian anak, hak hak anak, kedudukan anak

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 1, Februari 2024

E-ISSN: 3046-4560



PENDAHULUAN

Sistem pencatatan sipil merupakan bagian penting dari sistem administrasi kependudukan negara. Sistem ini bertujuan untuk mencatat dan mendokumentasikan segala peristiwa penting yang dialami setiap warga negara sejak Lahir hingga meninggal. Salah satu peristiwa penting yang harus dicatat adalah kelahiran. Pencatatan kelahiran bertujuan untuk menentukan status hukum seseorang dan memberikan perlindungan hukum kepadanya.

Akta kelahiran merupakan bukti resmi yang dikeluarkan negara atas terjadinya peristiwa kelahiran. Berkaitan dengan peran penting akta kelahiran tersebut, literatur telah membahas berbagai aspek terkait sistem pencatatan kelahiran, seperti dasar hukum, kelembagaan, prosedur, serta perbandingan sistem antar daerah. Literatur ini penting untuk memahami kerangka sistem pencatatan kelahiran secara menyeluruh beserta implementasinya di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan : pertama, metode deskriptif analitis, Bab ini mendeskripsikan dan menganalisis konsep, peraturan perundang-undangan terkait, dan sistem pencatatan kelahiran yang berlaku di Indonesia secara umum. Penjelasan disajikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman menyeluruh. Kedua, Studi Dokumentasi. Yaitu penulis melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian terkait, untuk menggambarkan kerangka hukum dan sistem yang berlaku. Informasi didapatkan dari sumber tertulis. Ketiga, Wawancara terbatas. Untuk mendapatkan informasi terkini mengenai implementasi di lapangan, penulis melakukan wawancara terbatas dengan beberapa narasumber kunci. Hasil wawancara digunakan untuk melengkapi penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dan sistem pencatatan kelahiran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

- 1. Kewajiban negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap peristiwa kependudukan dan penting yang dialami penduduk Indonesia.
- 2. Pentingnya memiliki bukti tertulis untuk menentukan status seseorang berdasarkan peristiwa hidup.
- 3. Manfaat akta kelahiran bagi individu dan pemerintah.
- 4. Kewajiban negara memberikan akses akta kelahiran kepada setiap anak secara gratis.

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 1, Februari 2024

E-ISSN: 3046-4560



Berdasarkan hasil kajian yang penulis lakukan terhadap literatur yang dibahas dalam penelitian ini, ada terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan.

1. Kelebihan Bab I:

- a. Memilih topik yang relevan dan aktual yaitu mengenai aspek hukum perlindungan anak dan sistem pencatatan kelahiran.
- b. Mengulas secara singkat tentang kedudukan penting akta kelahiran bagi perlindungan hakhak anak.
- c. Memaparkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan administrasi kependudukan di Indonesia.
- d. Mengungkap mengenai kewajiban negara memberikan perlindungan dan peranan dalam pencatatan kelahiran.
- e. Membandingkan berbagai undang-undang terkait penetapan status anak dan definisi "anak".
- f. Menyoroti pentingnya gratuitas pelayanan akta kelahiran sebagaimana diamanatkan UU.
- g. Mengaitkan dengan hak asasi manusia anak atas identitas dan kewarganegaraan.
- h. Mengambil sudut pandang hukum yang komprehensif dalam menganalisis persoalan.
- i. Penyusunan topik pembahasan yang sistematis dan logis berdasarkan uraian

2. Kekurangan Bab I

- a. Belum menjelaskan latar belakang masalah secara lengkap dan terperinci. Hanya menyinggung secara umum tanpa contoh kasus nyata.
- b. Analisis dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku masih kurang mendalam.
- c. Tidak ada penjabaran mengenai konsep dan kerangka berpikir (conceptual framework) yang mendasari pembahasan.
- d. Sumber referensi yang digunakan kurang beragam dan terbaru. Masih banyak mengacu undang-undang tanpa penelitian/bacaan lain.
- e. Belum ada pembahasan mengenai implementasi di lapangan atau kendala yang dihadapi.
- f. Analisis dan kesimpulan dirasa belum komprehensif dan kurang didukung bukti.
- g. Tidak ada saran atau rekomendasi kebijakan yang jelas.
- h. Struktur penulisan yang kurang sistematis dan logis alur pikirannya.
- i. Belum ada daftar pustaka di akhir Bab untuk memperkuat rujukan.

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 1, Februari 2024

E-ISSN: 3046-4560



3. Saran

- a. Penulis dapat menambahkan contoh kasus pelanggaran terkait hak akses akta kelahiran anak untuk memperkuat argumentasi.
- b. Perlu menguraikan lebih lanjut tentang implementasi dan kendala yang dihadapi anak untuk memperoleh akta kelahiran di lapangan.
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan konkret untuk mewujudkan akses akta kelahiran gratis bagi setiap anak sesuai UU. Misalnya larangan biaya admin, penguatan sanksi pelanggaran.
- d. Tambahkan perbandingan dengan negara lain terkait praktik terbaik perlindungan hak akses identitas anak.
- e. Uraikan lebih mendalam mengenai konsekuensi hukum dan hak asasi manusia bilamana akses akta kelahiran tidak terpenuhi.
- f. Tambah sumber referensi dari hasil penelitian terkini untuk memperkaya analisis

KESIMPULAN

Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak setiap anak akan akses akta kelahiran gratis sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu :

- a. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap peristiwa kependudukan dan penting yang dialami penduduk Indonesia, termasuk akta kelahiran sebagai bukti status seseorang.
- b. Akta kelahiran penting bagi individu untuk menentukan status hukum dan sebagai bukti kuat di pengadilan, serta bagi pemerintah untuk pengurusan administrasi kependudukan.
- c. Setiap anak berhak mendapatkan nama dan kewarganegaraan yang dicatat dalam akta kelahiran. Akses akta kelahiran harus gratis sesuai UU Perlindungan Anak.
- d. Pelayanan akta kelahiran gratis hanya untuk bayi baru lahir kurang tepat dan berpotensi melanggar UU serta UUD terkait diskriminasi.
- e. Perlu penguatan peraturan dan implementasi agar setiap anak berhak atas akta kelahiran gratis hingga usia 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anyar, H. A. (2018). Implementasi Pengesahan dan Pencatatan Anak Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Aziz, H. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. *Lex Jurnalica*, *15*(1), 56.

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 1, Februari 2024

E-ISSN: 3046-4560



- Aziz, H. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Anak dan System Pencatatan Kelahiran (1st ed.). *PT. Arr Rad Pratama*.
- Laksmana, D. F. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 107-115.
- Lain, S. M. T. P., & Hidayatullah, S. Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Siri.
- Sartika, D. D., & Isyanawulan, G. (2023). Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) untuk Mencegah Tindak Kekerasan Kepada Anak di Desa Talang Ipuh, Kabupaten Banyuasin. *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 22-27.
- Suparmin, S., Aziz, H., & Zulfikar, P. (2023). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid. Sus. Anak/2022/PN). *Jurnal Pemandhu*, 4(2), 198-211.
- Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat 1